

## Analisis Determinan Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2020

Aditya Eka Mahardika M.S<sup>a</sup>, Hendra Kusuma<sup>a</sup>

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.

\* Corresponding author: [adityamahardika702@gmail.com](mailto:adityamahardika702@gmail.com)

### Artikel Info

#### Article history:

Received 10 Maret 2022

Revised 11 Maret 2022

Accepted 11 Mei 2022

Available online 31 Mei 2022

**Keyword:** penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka.

JEL Classification <https://doi.org/10.1080/00141801.2022.2088888>  
P46, O15, E24

### Abstract

*This study aims to analyze the rate of economic growth, the human development index, the level of concern for the poor in Central Java Province in 2015 – 2020. The type of data used in this study is panel data. The tool used to perform the test is eviews9. The tests used in this study were FE, CE, RE, Chou, Hausman, LM, multiple linear regression and normality tests. The results show that the economic growth rate has a significant negative effect where the coefficient value is -0.043 with a probability value of 0.0475, the human development index has a significant negative effect where the coefficient value is -1.104 with a probability value of 0.0000, and the level of open partition has an insignificant effect with a coefficient 0.071 with a probability value of 0.2727.*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Untuk itu, disamping data jumlah dan persentasenya, profil serta karakteristik penduduk miskin juga dirasakan penting untuk diketahui (BPS-Statistics Indonesia, 2019).

Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai (Sukmaraga, 2011).

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu aspek penting mencapai kesejahteraan rakyat. Rumah tangga miskin umumnya bertempat tinggal di pedesaan dan mereka memiliki kegiatan di sektor

pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya setiap kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan langsung pada pengembangan desa pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Jekulo, Annur, 2013).

**Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah Dan Jawa Timur**

Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Jawa Barat	8,58	7,55	6,76	6,33	5,98	7,14	7,06
Jawa Tengah	11,50	11,38	10,55	9,67	8,99	10,09	10,36
Jawa Timur	8,41	7,91	7,13	6,97	6,77	7,89	7,61

Pada tabel 1 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih berada diposisi tertinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yaitu sebesar 10,36 persen. Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sebesar 7,06 persen dan di Jawa Timur sebesar 7,61 persen.

Persentase tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah merupakan agregat dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Presentase tingkat kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih tidak merata dan beberapa wilayah masih mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penduduk kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam usaha mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan di Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya tingkat penduduk miskin jika dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah sebagai penyangga proses perubahan dan perbaikan kehidupan masyarakat maupun kesadaran masyarakat sendiri untuk membantu pemerintah agar lebih mudah mengatasi masalah kemiskinan.

**Tabel 2. Persentase penduduk miskin, Laju pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Tingkat pengangguran terbuka**

Tahun	Penduduk miskin	Laju pertumbuhan PDRB_X1	IPM_X2	Tingkat Pengangguran terbuka_X3
2015	11,50	5,47	69,49	4,99
2016	11,38	5,25	69,98	4,63
2017	10,55	5,26	70,52	4,57
2018	9,67	5,30	71,12	4,47
2019	8,99	5,40	71,73	4,44
2020	10,09	-2,65	71,87	6,48

Dilihat pada tabel 2 Tingkat penduduk miskin yang menurun diikuti dengan Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Namun pada tahun 2019 menuju 2020 tingkat penduduk miskin kembali meningkat, laju pertumbuhan dan indeks pembangunan manusia kembali menurun dan tingkat pengangguran terbuka kembali naik yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, dimana banyak tenaga kerja yang di PHK, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, pendapatan yang menurun mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami resesi (kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun).

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah- masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi (Saputra, 2011).

Berdasarkan jurnal (Sukmaraga, 2011), menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 dengan bantuan software Eviews 4.1 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah, dan jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan jurnal (Wibisono, 2015) Sampel dalam penelitian ini adalah data sekunder terbitan Badan pusat Statistik (BPS) yang kemudian dianalisis menggunakan metode Regresi Linier panel data dengan pendekatan fixed effect model dan memasukan variable dummy ke dalam persamaan. Analisis dengan metode tersebut biasa disebut dengan *Least Square Dummy Variable* (LSDV). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel PDRB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Akan tetapi, tingkat pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan jurnal (Andhykha et al., 2018) menggunakan data sekunder dengan data *cross-section* terdiri dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan data time-series yaitu tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) atau disebut juga *Least Square Dummy Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasar hasil penelitian maka pemerintah disarankan untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan dan pengoptimalan pelayanan kesehatan.

Jurnal penelitian ini menggunakan data panel, selama 2015 hingga 2020 berdasarkan 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode yang digunakan, tahun, jumlah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020 dan menganalisis pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2011; 30) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai acara. Apabila dilihat dari berbagai sumber, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi (Okta Ryan Pranata Yudha Pembangunan et al., 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif (sekunder). Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang mengembangkan dan menggunakan model-model matematis (analisis), teori ataupun hipotesis yang keterkaitan dengan variable. Informasi serta data yang diperoleh kemudian akan diolah dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak dicari sendiri oleh peneliti, misalnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (time series) dari tahun 2015 - 2020 dan deret lintang (cross section) sebanyak 35 data mewakili kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemilihan periode ini disebabkan karena kemiskinan mengalami fluktuasi dan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan dan diikuti dengan penurunan pengangguran disetiap tahunnya, sehingga penelitian pada periode tersebut menarik untuk diamati. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2015 – 2020, untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah. Data yang diperlukan data tingkat penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dari Badan Pusat Statistika (BPS). Untuk mengetahui pengaruh pada variable independen

terhadap variable dependen maka akan di uji FE, RE, CE, Chou, Hausman dan LM untuk menentukan Model terbaik, uji T, uji F dan uji normalitas.

Penelitian ini menggunakan program Eviw9, dengan analisis panel data. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*). Data time series adalah data dari tahun 2015 sampai 2020, sedangkan data cross-section dalam penelitian ini adalah data dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Model regresi liniernya sebagai berikut:

$$Kit = ao + a1Mit + a2Eit + a3Pit + Uit$$

Dimana:

- K = Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah (persen)
- M = Industri Pengolahan/Manufacturing (persen)
- E = IPM Jawa Tengah (persen)
- P = Pengangguran (persen)
- ao = Intersep
- a1,a2,a3 = Koefisien regresi
- Uit = Error
- i = 1,2,3,4,5 (data *cross section* kabupaten/kota di Jawa Tengah)
- t = 1,2,3,4,5 (data *time series*, tahun 2015-2020)

## PEMBAHASAN

Berdasarkan olah data seberapa besar penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, IPM dan TPT diperoleh hasil berikut:

### A. Penduduk miskin

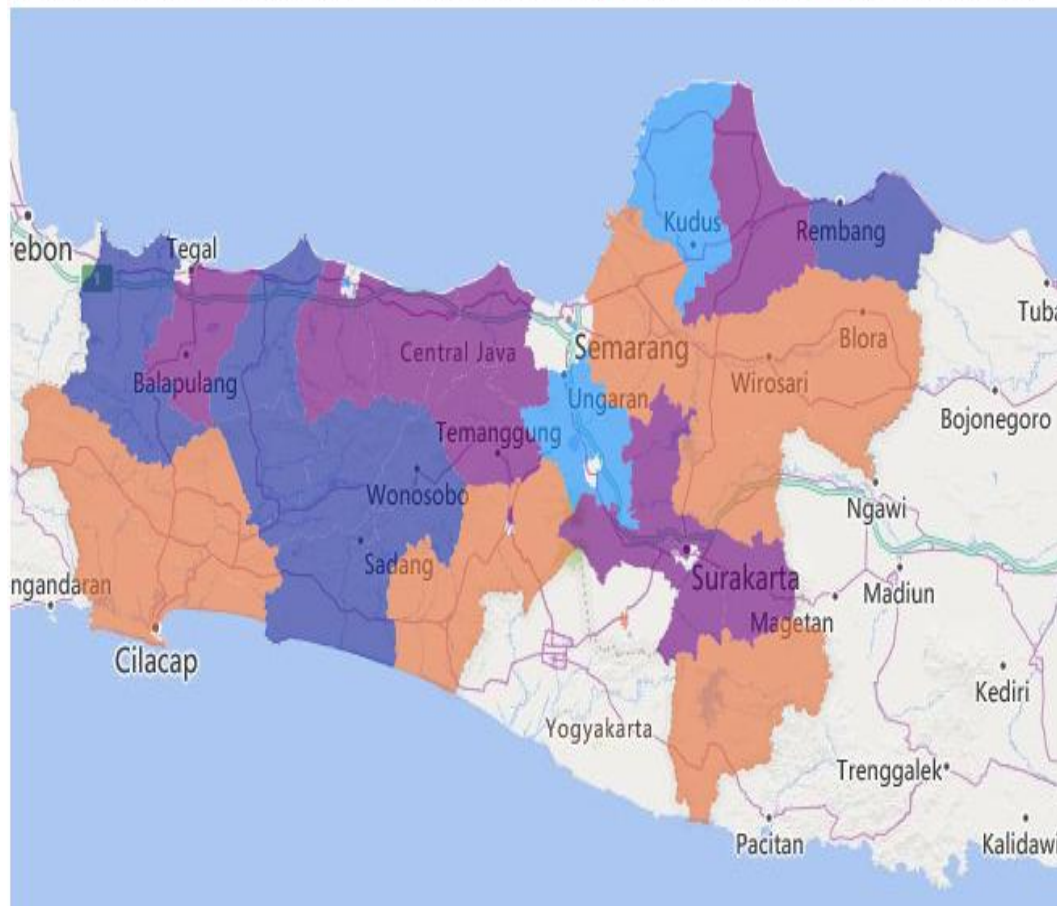
**Tabel 3. Persentase Tingkat Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Kabupaten Cilacap	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Banyumas	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Kabupaten Purbalingga	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Banjarnegara	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Kebumen	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Purworejo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Wonosobo	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Magelang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Boyolali	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Klaten	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Wonogiri	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Kabupaten Karanganyar	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Sragen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Grobogan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Blora	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Rembang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Pati	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kudus	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Jepara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Demak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Semarang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Temanggung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Kabupaten Kendal	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Batang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pekalongan	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pemasang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Tegal	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Brebes	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Magelang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Surakarta	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Salatiga	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Semarang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Pekalongan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Tegal	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

**Gambar 1. Peta Klasifikasi Tingkat Penduduk Miskin 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Rata-Rata (PPM) ● <7,93 (Rendah) ● >15,60 (Sangat Tinggi) ● 11,77-15,60 (Tinggi) ● 7,93-11,77 (Sedang)



Pada tabel 3 menunjukkan tingkat penduduk miskin pada tahun 2015 hingga 2020, secara rerata memperlihatkan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki rerata tingkat penduduk miskin 18,98%. Dalam artian Kabupaten Wonosobo memberikan sumbangan terbesar terhadap tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.

Pada gambar 1 dapat dilihat klasifikasi tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020, pada klasifikasi tingkat penduduk miskin kategori rerata rendah terdapat 6 wilayah, untuk kategori

rerata sedang terdapat 12 wilayah, untuk kategori rerata tinggi terdapat 10 wilayah, yaitu Kabupaten Cilacap, sedangkan dengan rerata sangat tinggi terdapat 7 wilayah.

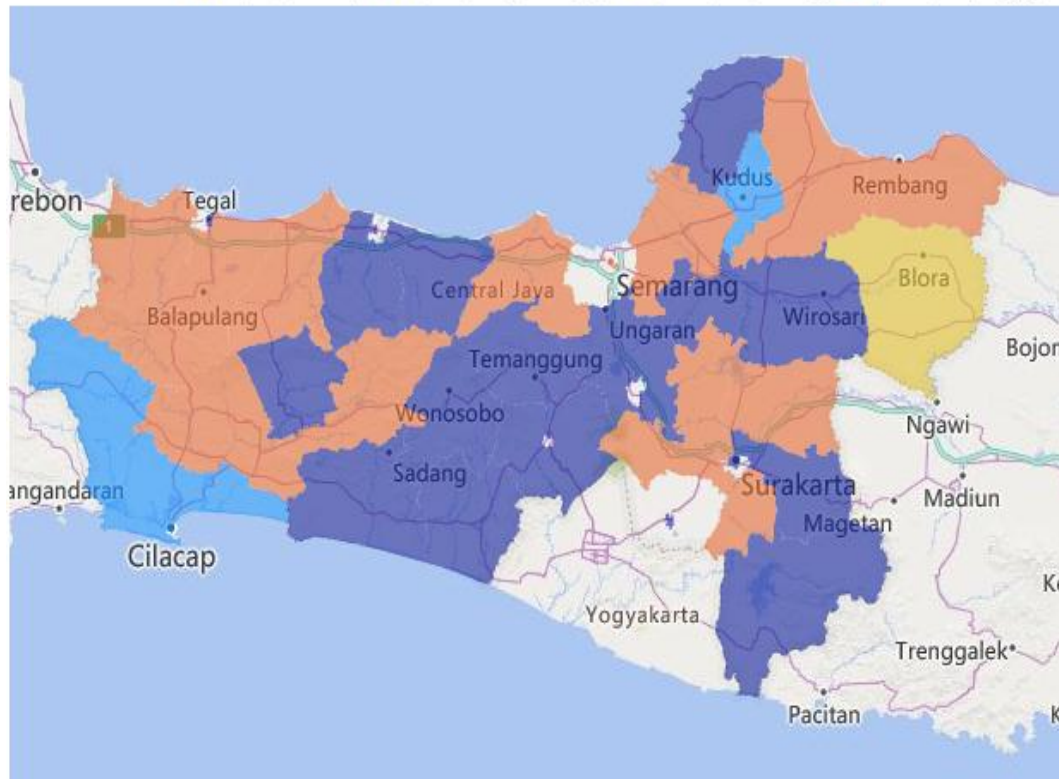
**B. Laju pertumbuhan ekonomi**

**Tabel 4. Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Kabupaten Cilacap	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Banyumas	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Purbalingga	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Kebumen	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Purworejo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Wonosobo	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kabupaten Magelang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Boyolali	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Klaten	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Wonogiri	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Karanganyar	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Sragen	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Grobogan	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Blora	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi
Kabupaten Rembang	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Pati	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Kudus	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
Kabupaten Jepara	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kabupaten Demak	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi
Kabupaten Semarang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Kabupaten Temanggung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kendal	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Batang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Pekalongan	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Pemalang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Tegal	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Brebes	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Magelang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kota Surakarta	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Salatiga	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Semarang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Pekalongan	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang
Kota Tegal	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

**Gambar 2. Peta Klasifikasi Laju Pertumbuhan Ekonomi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Rata-Rata (LPE) ● <3,51 (Rendah) ● >5,04 (Sangat Tinggi) ● 3,51-4,28 (Sedang) ● 4,28-5,04 (Tinggi)



Pada tabel 4 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hingga 2020, secara rerata memperlihatkan bahwa Kabupaten Blora memiliki rerata laju pertumbuhan ekonomi 6,45%. Dalam artian Kabupaten Blora memberikan sumbangan terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Pada gambar 2 dapat dilihat klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020, pada klasifikasi laju pertumbuhan ekonomi kategori rerata rendah terdapat 2 wilayah, untuk rerata kategori sedang terdapat 11 wilayah, untuk kategori rerata tinggi terdapat 21 wilayah, sedangkan untuk kategori rerata sangat tinggi terdapat 1 wilayah

### C. Indeks Pembangunan Manusia

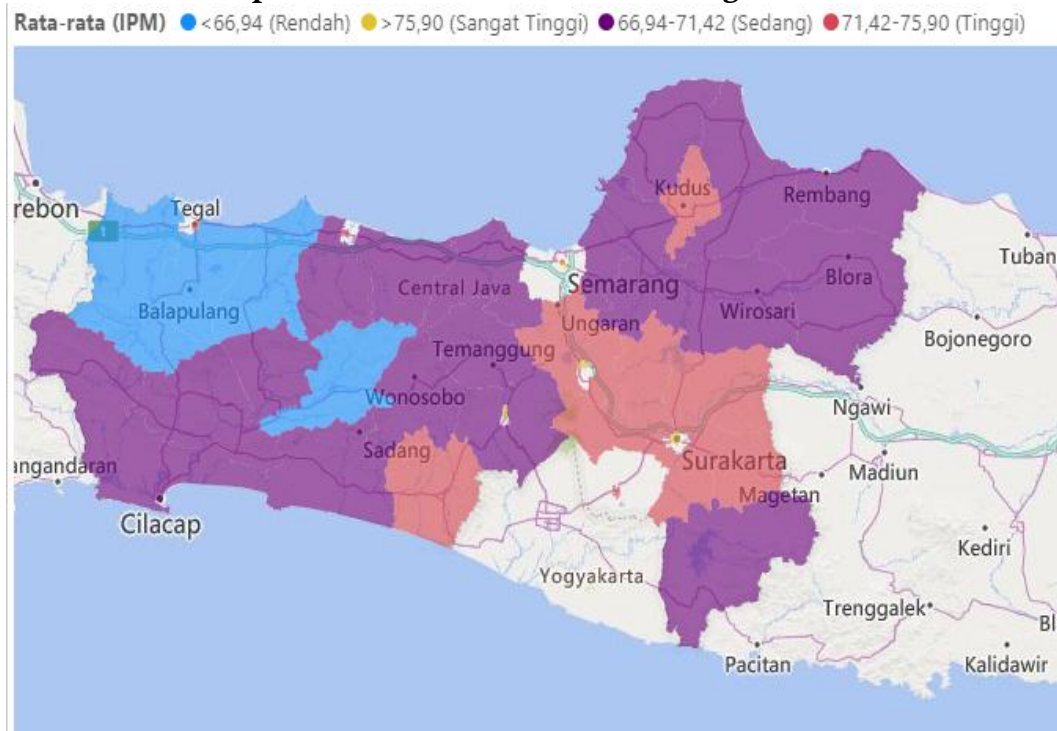
**Tabel 5. Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Kabupaten Cilacap	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Banyuwangi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Purbalingga	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Banjarnegara	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah
Kabupaten Kebumen	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Purworejo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Wonosobo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Magelang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Boyolali	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Klaten	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Sukoharjo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi



Kabupaten Wonogiri	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Karanganyar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Sragen	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Grobogan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Blora	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Rembang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pati	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kudus	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Jepara	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Demak	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Semarang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Temanggung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kendal	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Batang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pekalongan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pemasang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Tegal	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Brebes	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kota Magelang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Surakarta	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Salatiga	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Semarang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Pekalongan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Tegal	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

**Gambar 3. Peta klasifikasi indeks pembangunan manusia 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**



Pada tabel 5 menunjukkan indeks pembangunan manusia pada tahun 2015 hingga 2020, secara rerata memperlihatkan bahwa Kota Salatiga memiliki rerata indeks pembangunan manusia 82,08%. Dalam artian Kota Salatiga

memberikan sumbangan terbesar terhadap indeks pembanungan manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Pada gambar 3 dapat dilihat klasifikasi indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020, pada kategori rerata rendah terdapat 4 wilayah, untuk kategori rerata sedang terdapat 17 wilayah, untuk kategori rerata tinggi terdapat 10 wilayah, sedangkan untuk kategori rerata sangat tinggi terdapat 4 wilayah.

#### D. Tingkat Pengangguran Terbuka

**Tabel 6. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Kabupaten Cilacap	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Banyumas	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
Kabupaten Purbalingga	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kabupaten Banjarnegara	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang
Kabupaten Kebumen	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Kabupaten Purworejo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Wonosobo	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Magelang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Boyolali	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Kabupaten Klaten	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Sukoharjo	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Wonogiri	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Karanganyar	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Sragen	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Grobogan	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
Kabupaten Blora	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Rembang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Pati	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Kudus	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kabupaten Jepara	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
Kabupaten Demak	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Semarang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kabupaten Temanggung	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
Kabupaten Kendal	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Batang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Pekalongan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Pemalang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kabupaten Tegal	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kabupaten Brebes	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kota Magelang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi
Kota Surakarta	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kota Salatiga	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Kota Semarang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi
Kota Pekalongan	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kota Tegal	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

**Gambar 4. Peta klasifikasi tempat pengangguran terbuka 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**



Pada tabel 6 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 hingga 2020, secara rerata memperlihatkan bahwa Kabupaten Tegal memiliki rerata tingkat pengangguran terbuka 8,58%. Dalam artian Kabupaten Tegal memberikan sumbangan terbesar terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah.

Pada gambar 4 dapat dilihat klasifikasi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020, pada kategori rerata rendah terdapat 4 wilayah, untuk rerata kategori sedang terdapat 14 wilayah, untuk kategori rerata tinggi terdapat 13 wilayah, sedangkan untuk kategori rerata sangat tinggi terdapat 4 wilayah.

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan melalui *uji chow*, *uji hausman* dan *uji lagrange multiplier*, pada penelitian ini digunakan hasil regresi data panel menggunakan metode *Fixed Effect* (FE). Berikut ini adalah hasil dari regresi data panel FE yang telah diolah menggunakan Eviews 9 :

**Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik Random Effect (RE)**

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	90.49661	21.13171	0.0000
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0.043834	-1.996554	0.0475
IPM	-1.104478	-18.91825	0.0000
TPT	0.071007	-1.100312	0.2727
R-Square	0.976861		
F-Statistik	196.2558		

Berdasarkan hasil dari uji regresi data panel tersebut, adapun model serta pengujian hipotesis yang digunakan sebagai berikut.  
Interpretasi Hasil Regresi:

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya adalah melakukan analisis dengan menggunakan alat analisis regresi panel yang diperoleh sebagai berikut:

PENDUDU_MISKIN_Y	90.4966083305
LAJU_PERTUMBUHAN_PDRB_X1	- 0.0438338472456
IPM_X2	- 1.10447828798
TPT_X3	+ 0.0710068602317

Pembahasan Estimasi:

1.  $\alpha$  : Konstanta = 90.4966083305, Apabila laju pertumbuhan ekonomi. IPM dan TPT sama dengan 0, Maka tingkat kemiskinan sebesar 90.4966083305
2. X1: Laju pertumbuhan ekonomi = - 0.0438338472456, yakni merupakan koefisien laju pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0.0438338472456. Jadi apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen, maka menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.1802 persen di Provinsi Jawa Tengah.
3. X2: IPM = - 1.10447828798, yakni merupakan koefisien IPM yang berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan sebesar 1.10447828798. Jadi apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen, maka menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.10447828798 persen di Provinsi Jawa Tengah
4. X3: TPT = + 0.0710068602317, yakni merupakan koefisien TPT yang berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan sebesar + 0.0710068602317. Jadi apabila laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 persen, maka meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar + 0.0710068602317 persen di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uji FE didapatkan hasil uji F, uji T, koefisien determinasi ( $R^2$ ) dan uji normalitas sebagai berikut:

1. Uji F

Nilai  $df_1 = k - 1 = 2$ , dan  $df_2 = n - k = 35 - 3 = 32$ , pada  $\alpha = 5$  persen (0.05) diperoleh Nilai  $F_{hitung} = 1.308,72946$   $F_{tabel} = 3.29$ , dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} = 1.308,72946 > F_{tabel} = 3.29$  dan dapat ditarik kesimpulan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  dengan artian variable bebas variable bebas seperti : Laju pertumbuhan ekonomi (X1), IPM (X2) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) berpengaruh secara serentak terhadap variable terkait yaitu Tingkat Kemiskinan (Y).

2. Uji T

Hasil dari estimasi data diatas dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variable independen sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan ekonomi (X1)

Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar dengan nilai probabilitas 0.0000. Hal ini telah menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = -1,996554 < t_{tabel} = 2.03693$  dan nilai probabilitas  $0.0475 < \alpha = 5$  persen (0.05) dengan artian bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

b. IPM (X2)

Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -18.91825 dengan nilai probabilitas 0.0000. Hal ini telah menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = -18.91825 < t_{tabel} = 2.03693$  dan nilai probabilitas  $0.0000 < \alpha = 5$  persen (0.05) dengan artian bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

c. TPT (X3)

Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1.100312 dengan nilai probabilitas 0.0091. Hal ini telah menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = -1.100312 > t_{tabel} = 2.03693$  dan nilai probabilitas  $0.0091 < \alpha = 5$  persen (0.05) dengan artian bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.

3. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai R-square sebesar 0.976861. Dimana hal ini telah menunjukkan bahwa kemampuan variable independen seperti: Laju pertumbuhan ekonomi (X1), IPM (X2) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) mampu menjelaskan bahwa variable dependen yaitu tingkat kemiskinan sebesar 98 persen, sedangkan sisanya 2 persen dijelaskan oleh variable lain diluar model ini.

4. Uji Normalitas

Berdasarkan Uji normalitas diperoleh Prob. Jarque-Bera 0,790775 atau belih besar dari 0,5, maka dapat diartikan bahwa setiap variabel independent berdistribusi dengan normal terhadap variabel dependent.

Pengaruh dari masing-masing variable independen seperti Laju pertumbuhan ekonomi (X1), IPM (X2) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3) terhadap variable dependen yaitu Tingkat Penduduk Miskin (Y):

1. Pengaruh Laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat penduduk miskin

Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negative serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2020, dimana nilai koefisien dari produk domestik regional bruto sebesar -0.043834. Jadi apabila produk domestik regional bruto meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,3 persen di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto ini juga sesuai dengan penelitian dari Eka kumalasari 2019 yang berjudul "Pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota dikawasan pulau madura" Telah menunjukkan disaat produk domestik regional bruto meningkat maka akan berdampak pada kualitas serta pada konsumsi rumah tangga, semakin baik kualitas pada produksi domestik bruto maka akan menurunkan kemiskinan pula dengan banyaknya sumber daya manusia yang diperlukan. Karena produk domestik regional bruto

yang semakin luas dan semakin meningkat maka akan menciptakan lapangan pekerjaan di berbagai bidang sektor serta dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan adanya produk domestik regional bruto yang semakin luas serta meningkat tersebut (Kumalasari, 2019).

2. Pengaruh IPM terhadap tingkat penduduk miskin

Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2020, dimana nilai koefisien dari indeks pembangunan manusia sebesar -1.104478. Jadi apabila indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 1 persen, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.10 persen di Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan penelitian.

Pengaruh indeks pembangunan manusia ini juga sesuai dengan penelitian dari Eka kumalasari 2019 yang berjudul “Pengaruh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota dikawasan pulau madura” Telah menunjukkan disaat indeks pembangunan manusia meningkat maka akan mengakibatkan naiknya produktifitas kerja penduduk sehingga menaikkan penghasilan serta menurunkan kemiskinan (Kumalasari, 2019).

3. Pengaruh TPT terhadap tingkat penduduk miskin

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2020, dimana nilai koefisien dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.071007. Jadi apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 7,10 persen di Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan penelitian Zurisdah dengan judul “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten”, Pengangguran terbuka terhadap kemiskinan mempunyai pengaruh positif, semakin naik jumlah pengangguran terbuka maka semakin meningkat pula kemiskinan. Diperoleh nilai thitung sebesar 7.534 dan ttabel sebesar 1,697 dengan tingkat signifikansi 0,05 dan nilai probabilitasnya adalah 0,000. Jika dibandingkan antara thitung dan ttabel, maka diperoleh nilai thitung > ttabel ( $7.534 > 1,697$ ) dan signifikansi < 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan (Zurisdah, 2016).

## KESIMPULAN

Berdasarkan riset data panel telah terpilih model terbaik, yaitu model random effect. Laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020. Dapat diartikan ketika laju pertumbuhan menurun, tingkat penduduk miskin akan meningkat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020. Dapat diartikan ketika IPM menurun, tingkat

penduduk miskin akan meningkat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 hingga 2020. Dapat diartikan ketika TPT meningkat, tingkat penduduk miskin akan meningkat. Distribusi laju pertumbuhan ekonomi, IPM dan TPT pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020 normal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113–123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- BPS-Statistics Indonesia. (2019). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019. *Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2019*, 300. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/60138aa2d7b9b78802991240/penghitungan-dan-analisis-kemiskinan-makro-di-indonesia-tahun-2019.html>
- Jekulo, Annur, R. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3209>
- Kumalasari, E. (2019). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Kawasan Pulau Madura* (Issue April). Muhammadiyah Malang.
- Okta Ryan Pranata Yudha Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2009-2011. In *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2011*. Negeri Semarang.
- Saputra, W. A. (2011). Tingkat Kemiskinan [Diponegoro]. In *Ekonomi dan Bisnis*. <http://eprints.undip.ac.id/28982/1/Skripsi018.pdf>
- Sukmaraga, P. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB, Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah. In *Harvard Business Review* (Vol. 85, Issue 3). Diponegoro.
- Wibisono, R. Y. (2015). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah 2008-2013*. (Vol. 1, Issue 1). Diponegoro.
- Zurisdah, Z. (2016). *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.